

LAPORAN AKHIR
KKS PENGABDIAN LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2019



JUDUL

PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA BUNTULIA UTARA
DALAM MEMBANGUN KESADARAN MENDAFTARKAN
TANAH HAK MILIK

Oleh

NIRWAN JUNUS, SH.,MH, NIDN. 0002066906 Ketua Tim Pengusul
Prof. Dr. FENTY U. PULUHULAWA, SH.,M.Hum, NIDN. 0009046804 Anggota I
KARLIN Z. MAMU, SH.,MH, NUPN. 9909913199 Anggota II
AMANDA ADELINA HARUN, SH., MH Anggota III

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2019

HALAMAN PENGESAHAN
KKS PENGABDIAN MASYARAKAT SEMESTER GENAP T.A 2018/2019

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Judul Kegiatan | : PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA BUNTULIA UTARA DALAM MEMBANGUN KESADARAN MENDAFTARKAN TANAH HAK MILIK |
| 2. Lokasi | : Desa Buntulia Utara |
| 3. Ketua Tim Pelaksana | |
| a. Nama | : Nirwan Junus, SH, MH |
| b. NIP | : 196906022000032001 |
| c. Jabatan/Golongan | : Lektor Kepala / 4 b |
| d. Program Studi/Jurusan | : Ilmu Hukum / Ilmu Hukum |
| e. Bidang Keahlian | : |
| f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail | : 085256320906 |
| g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail | : |
| 4. Anggota Tim Pelaksana | |
| a. Jumlah Anggota | : 2 orang |
| b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian | : Prof. Dr. Fenty U. Puhulawa, SH, M.Hum / |
| c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian | : Karlin Z. Mamu, SH, MH / |
| d. Mahasiswa yang terlibat | : 30 orang |
| 5. Lembaga/Institusi Mitra | |
| a. Nama Lembaga / Mitra | : Kepala Desa Buntulia Utara |
| b. Penanggung Jawab | : Jardin Saleh |
| c. Alamat/Telp/Fax/Surat | : Jl. Trans Sulawesi No. 166 Desa Buntulia Utara Kabupaten Pohuwato |
| d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) | : 164 km |
| e. Bidang Kerja/Usaha | : Gerakan Masyarakat Pasing Tande Betas (GEMA PATAS). |
| 6. Jangka Waktu Pelaksanaan | : 2 bulan |
| 7. Sumber Dana | : PNSP 2019 |
| 8. Total Biaya | : Rp. 25.000.000,- |



Gorontalo, 12 Juni 2019
Ketua

Nirwan Junus
(Nirwan Junus, SH, MH)
NIP. 196906022000032001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN	iv
PRAKATA	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Analisis Situasi	1
B. Permasalahan Mitra	2
C. Solusi Yang Ditawarkan	2
BAB II. TARGET DAN LUARAN.....	3
A. Target.....	3
B. Luaran	3
C. Hilirisasi Riset	3
BAB III. METODE PELAKSANAAN	5
A. Persiapan dan Pembekalan	5
B. Pelaksanaan.....	6
BAB IV. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....	8
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	9
A. Gambaran Umum Desa Buntulia utara.....	9
B. Pendampingan Masyarakat Dalam Membangun Kesadaran Mendaftarkan Tanah Hak Milik	12
C. Uraian Program Yang Telah Dilaksanakan	12
BAB VI. PENUTUP	17
A. KESIMPULAN	17
B. SARAN	17
DAFTAR PUSTAKA	18
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Peta Lokasi KKS	
Lampiran 2 : Biodata Ketua dan Anggota Tim	
Lampiran 3 : Dokumentasi Kegiatan Tambahan	
Lampiran 4 : TOR	

RINGKASAN

Judul Pengabdian adalah *“Pendampingan Masyarakat Desa Buntulia Utara Dalam Membangun Kesadaran Mendaftarkan Tanah Hak Milik”*

Masalah kepemilikan tanah di Desa Buntulia di pengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hak kepemilikan atas tanah sebab dari jumlah penduduk 549 KK tersebut terdapat 463 orang yang belum mendaftarkan tanah hak milik. Hal ini tentunya menimbulkan persoalan yang cukup mendasar oleh pemerintah desa untuk diselesaikan. Dari hasil riset sebelumnya bahwa proses pendaftaran tanah hingga sampai dengan penerbitan sertifikat tanah sering menimbulkan berbagai masalah misalnya dalam pembuatan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah terdapat pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu. Oleh sebab itu dalam hilirisasi ini tim pengabdian akan memberikan pemahaman dan pengetahuan hukum kepada masyarakat betapa pentingnya mendaftarkan tanah hak milik sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Solusi yang ditawarkan kepada masyarakat dan Kepala Desa Buntulia Utara yakni melakukan sosialisasi tentang pentingnya mendaftarkan tanah hak milik serta melakukan pendampingan kepada masyarakat bersama-sama dengan pihak Badan Pertanahan melalui Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas (GEMA PATAS) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memasang tanda batas, sehingga memudahkan petugas BPN melakukan pengukuran, serta dapat mempercepat program pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kata Kunci: Kesadaran, Masyarakat, Pendaftaran, Tanah Hak Milik.

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Petunjuk-Nya sehingga laporan hasil Kuliah Kerja Sibermas (KKS) UNG Periode I Tahun 2019 ini dapat di selesaikan. Laporan ini berisi tentang keseluruhan rangkaian program mulai dari tahap awal hingga akhir pelaksanaan Kuliah Kerja Sibermas (KKS). Kuliah Kerja Sibermas (KKS) UNG ini sangat membantu proses pembelajaran bagi mahasiswa dalam melaksanakan program pengabdian. Selain bermanfaat bagi mahasiswa, pelaksanaan program ini juga sangat membantu masyarakat terutama masyarakat yang berada di Desa Buntulia Utara Kabupaten Pohuwato khususnya dalam hal peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanah hak milik melalui Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas (GEMA PATAS).

Kami sebagai tim pelaksana Kuliah Kerja Sibermas (KKS) UNG Periode I Tahun 2019 menyadari bahwa laporan ini memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, saran dan pendapat menjadi sangat berguna untuk perbaikan laporan Kuliah Kerja Sibermas (KKS) UNG ini. Semoga dapat memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih.

Gorontalo, Juni 2019

Tim Pelaksana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Tanah pada umumnya berkaitan dengan tempat pemukiman dan kegiatan manusia di atasnya maupun di bawahnya, sedangkan dilihat dari aspek hukum berkaitan dengan hak memiliki dan menggunakan, namun seiring berkembangnya masyarakat, dalam bidang pertanahan sering terjadi konflik pertanahan. Masalah sengketa tanah dimasyarakat ini karena belum meratanya bukti surat kepemilikan tanah yang sah dimiliki oleh masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagaimana di atur dalam Pasal 19 UUPA 1960 bahwa pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat dibidang pertanahan.¹ Hal itu memberikan gambaran bahwa tanah belum dapat memberikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebgaiamana dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah pada tahun 2016 membuat kebijakan tentang percepatan persertipikatan tanah secara masal dan gratis yang dibiayai oleh pemerintah. Kebijakan ini disebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tujuannya yaitu mensertipikatkan seluruh bidang tanah yang belum memiliki sertipikat dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Desa Buntulia merupakan wilayah yang banyak penduduknya yakni berjumlah 549 KK. Hal ini yang menyebabkan kebutuhan tanah secara otomatis meningkat.² Dari jumlah tersebut terdapat 463 orang yang belum mendaftarkan tanah. Berkaitan dengan masalah kepemilikan atas tanah di Desa tersebut di pengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk

¹ Lihat Pasal 19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960

² Siti Hardianti Rukmana Manurung, 2017, Strategi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Dalam Meminimalisir Permasalahan Tumpang Tindih Sertifikattanah (Overlapping) Di Kota Pekanbaru, *JOM FOSIP Vol. 4 No. 2-Oktober 2017*, Hal. 2

mendaftarkan hak milik atas tanah, yang tentunya menimbulkan persoalan yang cukup mendasar oleh pemerintah desa untuk diselesaikan.

Solusi yang ditawarkan kepada masyarakat dan Kepala Desa Buntulia Utara yakni tim Pengabdian akan melakukan sosialisasi tentang pentingnya mendaftarkan tanah hak milik serta melakukan pendampingan kepada masyarakat bersama-sama dengan pihak Badan Pertanahan melalui Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas (GEMA PATAS) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memasang tanda batas, memudahkan petugas BPN melakukan pengukuran, sehingga dapat mempercepat program pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan demikian masyarakat dapat memahami betapa pentingnya legalisasi hak kepemilikan atas tanah untuk menghindari terjadinya perselisihan sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

B. Permasalahan Mitra :

- a. Masyarakat Desa Buntulia Utara belum paham tatacara mendaftarkan tanah hak milik.
- b. Sering terjadi konflik diantara para pihak.
- c. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki sertifikat hak milik atas tanah.

C. Solusi yang Ditawarkan

- a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Kepala Desa Buntulia.
- b. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Buntulia Utara tentang pentingnya mendaftarkan hak milik atas tanah.
- c. Tim Pengabdian (DPL, dan Mahasiswa) bersama-sama dengan pihak BPN melakukan pendampingan kepada masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas (GEMA PATAS).

BAB II

TARGET DAN LUARAN

A. Target :

Melakukan pendampingan kepada masyarakat Desa Buntulia Utara agar memahami tata cara pendaftaran tanah melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan hak milik atas tanah serta melakukan pendampingan kepada masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas (GEMA PATAS).

B. Luaran :

- 1) Melakukan pendekatan kepada masyarakat Desa Buntulia Utara agar memahami tata cara pendaftaran tanah.
- 2) Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Buntulia Utara tentang pentingnya mendaftarkan hak milik atas tanah.
- 3) Tim Pengadi (DPL, dan Mahasiswa) bersama-sama dengan pihak BPN melakukan pendampingan kepada masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas (GEMA PATAS).
- 4) Jurnal.

C. Hilirisasi Riset

Tanah pada umumnya rawan konflik. Oleh sebab itu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Agraria menetapkan suatu langkah kebijaksanaan baru, yaitu memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan biaya relatif murah, agar dapat terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat khususnya bagi golongan ekonomi lemah.³ Namun, dalam proses pendaftaran tanah hingga sampai dengan penerbitan sertifikat tanah sering kali muncul berbagai masalah misalnya dalam pembuatan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah terdapat pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu. Terkait dengan hal tersebut riset yang pernah dilakukan adalah

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*. Cet ke-4, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2001), hlm 39 - 41

“Implementasi Penetapan Biaya Administrasi Proyek Nasional Operasi Agraria (Prona)”. Dari hasil riset ini akan di implementasikan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan judul ***“Pendampingan Masyarakat Desa Buntulia Utara Dalam Membangun Kesadaran Mendaftarkan Tanah Hak Milik”***. Mengingat sengketa hak atas tanah yang terjadi disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendaftar tanah hak milik, mengakibatkan tidak terlindunginya hak-hak kepemilikan atas tanah oleh masyarakat, sehingga masyarakat berada pada posisi yang lemah jika timbul konflik. Oleh sebab itu dalam hilirisasi ini tim pengabdian akan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat betapa pentingnya mendaftar hak milik atas tanah serta melakukan pendampingan bersama-sama dengan pihak BPN dan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas (Gema Patas) untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

A. Persiapan dan Pembekalan

1. Mekanisme pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Sibermas (KKS) meliputi tahapan berikut:
 - a) Perekrutan mahasiswa peserta
 - b) Koordinasi dengan Kepala Desa Buntulia Utara ke Lokasi Kuliah Kerja Sibermas (KKS)
 - c) Pembekalan (*coaching*) dan pengasuransian mahasiswa
2. Materi pembekalan/ *Coaching* kepada mahasiswa mencakup :
 - a) Fungsi mahasiswa dalam KKS oleh Kepala LPM-UNG
 - b) Tata cara pendaftaran tanah bagi masyarakat oleh DPL.
 - c) Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan tanah hak milik.
3. Pelaksanaan tahapan kegiatan Kuliah Kerja Sibermas (KKS) berlangsung dari bulan Maret – Mei 2019.
 - a) Pelepasan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Sibermas Kuliah Kerja Sibermas (KKS) oleh Kepala LPM-UNG
 - b) Pengantaran 30 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Sibermas Kuliah Kerja Sibermas (KKS) ke lokasi.
 - c) Penyerahan peserta Kuliah Kerja Sibermas Kuliah Kerja Sibermas (KKS) ke lokasi oleh panitia ke pejabat setempat.
 - d) Pengarahan oleh Dosen Pembimbing Lapangan di bantu oleh unsur pemerintah setempat.
 - e) Monitoring dan evaluasi perdua minggu kegiatan.
 - f) Monitoring dan evaluasi pertengahan kegiatan.
 - g) Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan Kuliah Kerja Sibermas Kuliah Kerja Sibermas (KKS).
 - h) Penarikan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Sibermas Kuliah Kerja Sibermas (KKS).

B. Pelaksanaan

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan tanah membutuhkan kerjasama dengan pemerintah desa. Solusinya yakni:

- a) Dalam Kuliah Kerja Sibermas (KKS) ini, tim akan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan hak milik atas tanah.
- b) Tim Pengadi (DPL, dan Mahasiswa) bersama-sama dengan pihak BPN melakukan pendampingan kepada masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas (GEMA PATAS).
- c) Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:
 - 1) Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan kepala Desa Buntulia Utara
 - 2) Mengidentifikasi persoalan masyarakat, khususnya terkait dengan persoalan pertanahan.
 - 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan tanah.
 - 4) Pendataan tanah masyarakat yang belum didaftarkan.
 - 5) Pemasangan patok untuk menentukan batas-batas tanah masyarakat.
 - 6) Melakukan pendampingan terhadap tanah masyarakat yang belum memiliki sertifikat ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato.

Pekerjaan yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan dihitung dalam volume 144 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) dalam sebulan. Rata-rata jam kerja efektif mahasiswa (JKEM) perhari 4,8 sebagai acuan. Uraian tabel dalam bentuk program dan jumlah mahasiswa pelaksananya adalah:

Tabel 1. Uraian pekerjaan, program dan volumenya dalam 2 bulan

No	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)	Keterangan
1	Pengumpulan Data Awal	Survei	2880	10 orang mahasiswa
2	Sosialisasi tentang pentingnya mendaftarkan hak milik atas tanah, dan	Sosialisasi/identifikasi	2880	10 orang mahasiswa

	identifikasi konflik yang terjadi di Desa Buntulia Utara			
3	Melakukan pendampingan kepada masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas (GEMA PATAS).	Pendampingan	2880	10 orang mahasiswa
Total Volume Kegiatan			8640	30 orang

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, merupakan lembaga yang menaungi mahasiswa untuk melaksanakan Kuliah Kerja Sibermas (KKS-UNG) yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam jadwal akademik telah mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran dan pemberdayaan pada masyarakat yang tertuang dalam mata kuliah; Kuliah Kerja Sibermas (KKS).

Peningkatan kegiatan pendampingan masyarakat ini melalui pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan melibatkan peran serta Dosen, Pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Akademisi selaku pengemban Tridharma Perguruan Tinggi dalam perannya meningkatkan pengabdian pada masyarakat dengan cara memetakan permasalahan yang terjadi pada masyarakat khususnya yang terkait dengan kesadaran mendaftarkan tanah hak milik.

Permasalahan yang telah dirumuskan menjadi rencana kegiatan dalam menentukan muatan materi yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah pendaftaran tanah oleh Tim Akademisi yang terlibat dalam kegiatan Kuliah Kerja Sibermas (KKS). Dalam kegiatan pengabdian ini Tim DPL akan melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan hak milik atas tanah melalui Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas (GEMA PATAS).

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Buntulia Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato

Desa Buntulia Utara terletak di Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Desa ini merupakan salah satu desa dengan luasan terbesar di Kecamatan Buntulia yaitu 42 km². Potensi sumber daya alam hayati dan non hayati di 19 desa ini tersebar merata di hampir seluruh wilayah Desa Buntulia Utara. Lahan perkebunan dan tegalan/ladang cukup mendominasi penggunaan lahan di desa ini dan dapat dijadikan sebagai sektor penunjang dalam rangka pengembangan dan pembangunan di Desa Buntulia Utara secara khusus dan wilayah Kabupaten Pohuwato secara umum. Secara definitif, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Berlandaskan definisi tersebut, dalam rangka penyediaan informasi dan data desa yang sesuai dengan fakta perencanaan pembangunan desa, pemerintah Desa Buntulia Utara melakukan penyusunan profil desa. Inisiatif tersebut tentunya memberikan akses terhadap informasi menyeluruh tentang desa Buntulia Utara yang meliputi data potensi desa baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa. Akses tersebut diharapkan mampu menjadi landasan dalam kontes pengembangan Desa Buntulia Utara yang meliputi :

1) Administrasi Wilayah

Letak geografis Desa Buntulia Utara berada pada koordinat 1220 41'19.37" BT sampai 1220 44'42.34" BT dan 00 35'54.50" LU. Adapun batas-batas Desa Buntulia Utara sebagai berikut :

Batas Utara	: Desa Taluduyunu Utara
Batas Selatan	: Desa Buntulia Tengah
Batas Barat	: Desa Taluduyunu
Batas timur	: Desa Sipatana

Desa Buntulia Utara memiliki 4 Dusun yang terdiri dari :

- a) Dusun Kenari 1
- b) Dusun Kenari 2
- c) Dusun Milalude 1
- d) Dusun Milalude 2

2) **Kondisi Geografis Wilayah**

Secara topografi Desa Buntulia Utara didominasi oleh bentuk lahan perbukitan. Desa Buntulia Utara didominasi oleh *ordo Inceptisol*. *Inceptisol* merupakan *ordo* tanah yang belum berkembang lanjut dengan ciri-ciri bersolum tebal antara 1.5-10 meter di atas bahan induk, bereaksi masam dengan pH 4.5-6.5. Desa Buntulia Utara memiliki pola sebaran hujan wilayah yang relatif seragam dimana merata curah hujan tahunan sebesar 322 mm/tahun. Suhu rata-rata harian di desa ini adalah 29⁰C dengan kelembaban udara rata-rata adalah 80%.

3) **Penggunaan Lahan (*Landuse*) dan Komoditi Penggunaan lahan (*landuse*) di Desa Buntulia Utara meliputi:**

- a) Ladang
- b) Tanah Kas Desa
- c) Lainnya

Komoditi pertanian di Desa Buntulia Utara yang menjadi andalan masyarakat ialah Jagung. Selain itu, aneka buah-buahan yang dibudidayakan oleh masyarakat ialah Pisang dan Kelapa.

4) **Kependudukan**

Jumlah Penduduk Desa Buntulia Utara sebagai berikut:

- a) Laki-laki : 52.63%
- b) Perempuan : 47.37%
- c) Jumlah Kepala Keluarga : 549

Tabel 1. Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG
1	PLAY GROUP	49
2	TK	29
3	SD	105
4	SMP	26
5	SMA	31

Tabel 2. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Kegiatan	Laki -Laki	Perempuan
1	Petani	231	2
2	Buruh Tani	31	1
3	Pegawai Negara Sipil	0	1
4	Pedagang Barang Kelompok	10	0
5	Montir	5	0
6	Pengusaha Kecil ,Menengah dan Besar	0	1
7	Guru Swasta	0	0
8	Pedagang Keliling	3	0
9	Penambang Keliling	1	1
10	Tukang Kayu	6	0
11	Tukang Batu	1	0
12	Pembantu Rumah Tangga	1	2
13	Karyawan Perusahaan Swasta	1	0
14	Wiraswasta	10	1
15	Tidak Mempunyai Tetap	26	8
16	Belum Bekerja	95	66
17	Pelajar	70	77
18	Ibu Rumah Tangga	0	272
19	Perangkat Desa	4	2
20	Sopir	2	0

B. Pendampingan Masyarakat Dalam Membangun Kesadaran Mendaftarkan Tanah Hak Milik

Tanah merupakan tempat pemukiman semua makhluk. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 2 jelas tergambar hubungan antara manusia dan tanah diatur oleh negara, yang tujuannya adalah memberi keseimbangan dan keselarasan antara hubungan hukum yang bersifat formal dan juga hubungan hukum yang bersifat materil⁴. Dalam hal ini hukum menghendaki adanya kepastian. Oleh sebab itu, pemerintah pada tahun 2016 membuat kebijakan tentang percepatan perasetifikatan tanah secara massal dan gratis. Kebijakan ini disebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL merupakan program pemerintah yang tujuannya adalah mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan tanah hak milik.

Pendaftaran Tanah Hak Milik adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat yang dilakukan secara terus menerus secara berkesinambungan dan teratur, yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai mengenai bidang-bidang tanah sebagai bukti bidang tanah yang dimiliki.

Kebijakan pemerintah dalam program PTSL ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato. Akan tetapi, dari target 10.000 Ha yang terukur hanya 7.000Ha. Dari hasil diskusi bahwa Program PTSL ini pada kenyataannya belum tersebar di semua desa sehingga masyarakat belum mengetahui adanya program tersebut.

C. Program yang telah berhasil dilaksanakan di Desa Buntulia Utara

Adapun Program yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa KKS selama di lokasi adalah:

- 1) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya mendaftarkan tanah hak milik.

⁴ Muh. Yamin, Abdul Rahim Lubis, 2004, Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria, Pustaka Bangsa Press, Medan, H. 126.

- 2) Pendataan tanah masyarakat Buntulia Utara yang belum memiliki sertifikat tanah hak milik.

Dalam kegiatan ini mahasiswa KKS dibagi dalam 4 Dusun untuk memperoleh gambaran bidang tanah sehingga datanya terurut dan dapat diketahui pemilik sebenarnya, sebagaimana pada gambar dibawah ini.

Gambar 1

Proses Pendataan dan Pengumpulan Data Masyarakat yang Belum Memiliki Sertifikat



Tujuan pendaftaran tanah tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang dimiliki. Dalam pendaftaran tanah diperlukan kepastian data fisik obyek tanahnya (letak, batas, luas, penggunaan) maupun kepastian data yuridis subyek tanah (riwayat, penguasaan dan kepemilikannya serta pihak yang memberi keterangan kebenaran penguasaan tanah tersebut). Inti dari program PTSL ini adalah bukti surat dan data fisik yang merupakan langkah awal dalam menentukan batas-batas bidang tanah. Adapun syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam mendaftarkan tanah hak milik yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), SPT Pajak, Surat Tanah (jual beli, hibah, warisan, dll).

- 3) Pemasangan patok di tanah yang belum memiliki sertifikat dan batas ini merupakan salah satu gerakan yang di dilakukan mahasiswa yaitu GEMA PATAS (Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas) sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2
Pemasangan Patok sebagai Bentuk partisipatif Mahasiswa Dan Masyarakat
Guna Membangun Kesadaran Hukum Di Kalangan Masyarakat



Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak milik atas tanah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- 4) Kegiatan pendampingan terhadap masyarakat Desa Buntulia Utara dalam proses pendaftaran tanah sebagaimana gambar berikut.

Gambar 3

Proses Pendampingan Tanah yang belum memiliki sertifikat ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato



Dari hasil pendampingan tersebut, di peroleh bahwa kesadaran masyarakat di Desa Buntulia Utara dalam mendaftarkan tanah hak milik masih sangat minim. Selain itu, dari segi ekonomi, sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah petani Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar tanah masyarakat belum di daftarkan.

- a. Hambatan dalam program kerja di lokasi KKS

Setelah melakukan kegiatan observasi dan identifikasi masalah, maka ditemukan beberapa hambatan/masalah yang dihadapi dilokasi KKS, antara lain:

- 1) Kurangnya pemahaman maupun kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanah;
- 2) Banyak tanah-tanah yang dikuasai masyarakat tidak mempunyai surat (surat jual beli, hibah, warisan, dll);
- 3) Masyarakat tidak mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mendaftarkan tanah hak milik.
- 4) Kurangnya petugas lapangan yang ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato.

b. Solusi yang dilakukan adalah:

- 1) Apabila masyarakat tidak mempunyai surat tanah dalam mendaftarkan tanah hak milik maka upaya lain adalah membuat surat pernyataan dari pihak pemilik, dan disaksikan oleh 2 orang saksi.
- 2) Menggunakan sistem satelit, dimana setiap petugas hanya mendatangi setiap pemilik lahan untuk dilakukan pendaftaran hak milik.

Dengan telah didaftarkannya bidang tanah yang dimiliki, maka kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanah hak milik mengalami peningkatan, dan secara otomatis masyarakat ikut berpartisipasi dalam program Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas (GEMA PATAS). Selain itu, tanah yang sudah bersertifikat dapat digunakan untuk mengurangi potensi sengketa kepemilikan tanah yang sering terjadi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan program KKS menjadikan mahasiswa mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di Desa Buntulia Utara mulai dari mengidentifikasi persoalan masyarakat, khususnya terkait dengan persoalan pertanahan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan tanah, pendataan tanah masyarakat yang belum didaftarkan, pemasangan patok untuk menentukan batas-batas tanah masyarakat, serta melakukan pendampingan terhadap tanah masyarakat yang belum memiliki sertifikat ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato. Dengan demikian masyarakat telah berpartisipasi dalam Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas (GEMA PATAS).

B. Saran

Berharap kiranya apa yang sudah dilakukan oleh Mahasiswa KKS terhadap program tersebut, dapat dilanjutkan melalui program pemerintah desa terkait upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal mendaftarkan tanah hak milik, sehingga desa ini menjadi contoh bagi desa lain dan kami pun berharap program ini dapat dilanjutkan kembali dengan program lainnya yang bisa didanai oleh DP2M pada tahun-tahun selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Muh. Yamin, Abdul Rahim Lubis, 2004, Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria, Pustaka Bangsa Press, Medan.

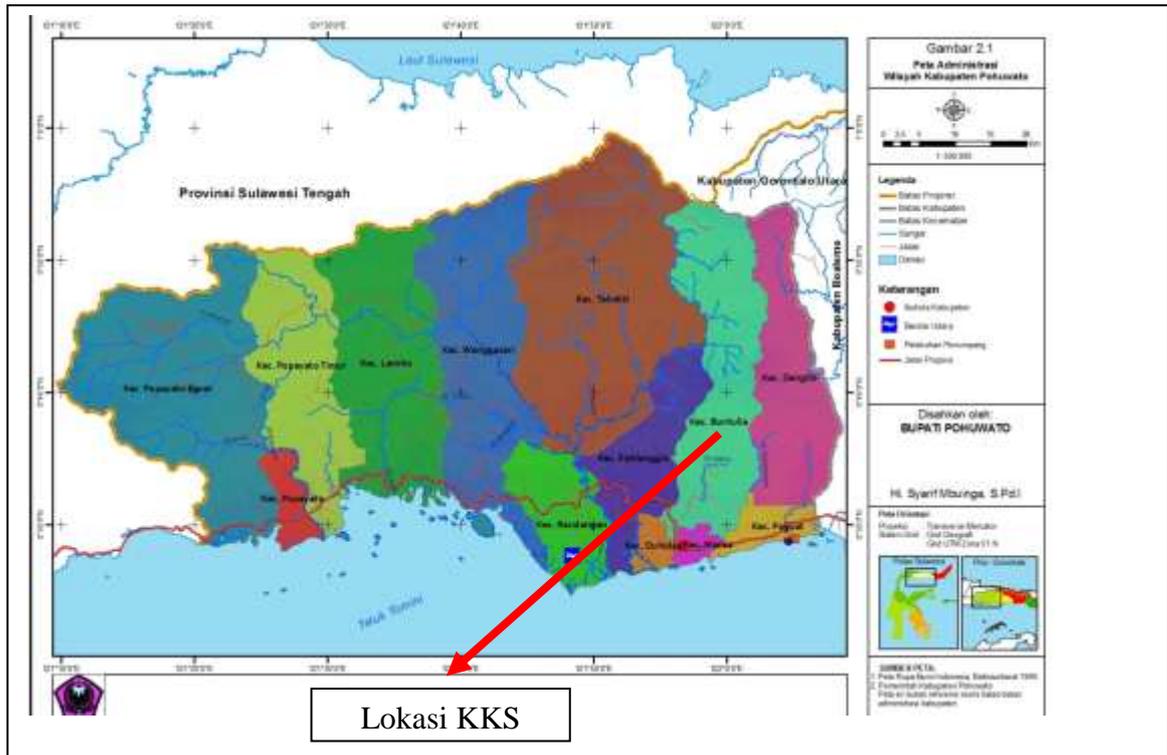
Siti Hardianti Rukmana Manurung, 2017, Strategi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Dalam Meminimalisir Permasalahan Tumpang Tindih Sertifikatanah (Overlapping) Di Kota Pekanbaru, JOM FOSIP Vol. 4 No. 2-Oktober 2017.

Sudikno Mertokusumo, Hukum dan Politik Agraria. Cet ke-4, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2001).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Lampiran 1 : Peta Lokasi KKS



Lampiran 2a: Biodata Ketua Tim Pelaksana

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Nirwan Junus, SH. MH
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Pembina / IVb
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19690602 200003 2 001
5	NIDN	0002066906
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 02 Juni 1969
7	E-mail	Nirwan14@yahoo.com
8	Nomor Telepon/HP	085256320906
9	Alamat Kantor	-
10	Nomor Telepon/Faks	-
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 0 Orang; S-2 = 0 Orang; S-3 = 0 Orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Ilmu Negara
		2. Hukum Agraria
		3. Hukum Dagang
		5 Hukum Pajak
		6 Hukum Tata Negara
		7 Hukum Lingkungan

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Univ. Samratulangi Manado	Univ. Hasanudin	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Lulus	1993	2005	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Aspek-Aspek Hukum Adopsi Dalam Hubungannya Dengan Hukum Kewarisan Islam	Status Hukum Penguasaan Tanah Bantaran Danau Limboto	
Nama Pembimbing/Promotor	Yahya Bin Smith, SH	Dr. Anwar Borahima,SH,.MH	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jmlh (Juta Rp)
1	2012	Status Hukum Tanah Bantaran Danau Limboto di Provinsi Gorontalo	PNBP	10 Juta
2	2013	Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Illegal Logging Di Provinsi Gorontalo	PNBP	25 Juta

3	2013	Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Pertambangan Rakyat Di Provinsi Gorontalo	DIKTI Tahun I	50 Juta
4	2014	Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Pertambangan Rakyat Di Provinsi Gorontalo	DIKTI Tahun ke II	48.122.500
5	2015	Kebijakan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan Lokal Pada Suku Bajo di Gorontalo	IDB dan DP2M DIKTI Tahun I	105 Juta
6	2015	Model Pengaturan Dan Pemanfaatan Hak-Hak Atas Tanah Masyarakat Bantaran Danau Limboto Provinsi Gorontalo	PNBP	41.000.000
7	2016	Kebijakan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan Lokal Pada Suku Bajo di Gorontalo	IDB dan DP2M DIKTI Tahun II	225 Juta
8	2016	Implementasi Penetapan Biaya Administrasi Proyek Nasional Operasi Agraria (Prona) oleh Lurah Di Kota Gorontalo (Penelitian Kolaboratif)	PNBP	10.000.0000
9	2017	Kebijakan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan Lokal Pada Suku Bajo di Gorontalo	IDB dan DP2M DIKTI Tahun III	197.574.000

10	2018	Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Hutan Tanaman Industri Bagi Masyarakat Adat (Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa.)	PNBP	20.000.000
----	------	--	------	------------

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun

Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2011	Penyuluhan Tentang Pelestarian Danau Limboto di Desa Iluta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo	PNBP	7,5
2	2012	Instruktur PLPG (Pendidikan Latihan Profesi Guru)	Diknas	4 juta
3	2012	Pelatihan Pembuatan Perdes Hewan Lepas Di Desa Batulayar Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo	PNBP	10 Juta
4	2014	Pemanfaatan Alat Penangkap Ikan Tradisional Buili dan Peningkatan Kesadaran Hukum masyarakat Nelayan Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan Di Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai	DP2M-DIKTI	72 .500.000
5.	2014	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Pohe Dalam	PNBP	25 Juta

		Rangka Pelestarian Lingkungan Pesisir pantai sebagai ajang tempat wisata		
6.	2015	Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Pentingnya Membayar Pajak Di Desa Helumo Kab.Gorontalo Utara	PNBP	25 Juta
7	2016	Inovasi Pemanfaatan Limbah Kotoran Ternak Melalui Fermentasi Sebagai Pupuk Dalam Mendukung Kelestarian Lingkungan Serta Implementasi Perda Hewan Lepas Dikabupaten Gorontalo	DP2M-DIKTI	70 Juta
8	2016	Dampak Hutan Tanaman Industri Bagi Masyarakat Desa Payu Kecamatan Motilango	PNBP	25 Juta
9	2017	Pemberdayaan Wanita Pesisir Dalam Mengurangi Dampak Pencemaran Lingkungan Melalui Pengembangan Potensi Lokal Limbah Jeroan Ikan	DP2M-DIKTI	75 .000.000

E. Publikasi Artiel Ilmiah Dalam Jurnal Alam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Perkembangan Hukum Pentanahan dan Eksistensi Pengakuan Hak Ulayat Menurut Hukum UUPA.	Jurnal Legalitas	Vol 1 Mei 2008.
2	Kebijakan Pertanahan di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Prinsip Hukum Tata Ruang.	Jurnal Legalitas	Oktober 2008
3	Konsep Pembaharuan Hukum Agraria Sesuai Amanat Undang-	Legalitas	Februari 2009.

	Undang Dasar 1945.		
--	--------------------	--	--

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun

Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar	Pertambangan Rakyat Di Gorontalo (dilihat dari Perspektif Hukum)	11 Oktober 2301 Hotel Jambura
2	Prosiding Seminar Nasional	Peningkatan Pengetahuan Hukum Nelayan Dalam Memanfaatkan Alat Penangkap Ikan Tradisional Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan	20 November 2014. Universitas Tarumanegara Jakarta.

G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Hukum Agraria dan Perkembangannya di Indonesia	2011	119	Mandiri Publishing Gorontalo
2	Hukum Kehutanan	2013	77	Interpena
3	Problematika Pertambangan dan Solusi (Dilihat dari Perspektif Hukum)	2014	72	CV Budi Utama
4	Nilai Lokal dan Hukum Perlindungan Sumber Daya Ikan	2017	128	Alinea Baru Yogyakarta

H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
	-	-	-	-

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial lainnya yang Telah diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
	-	-	-	-

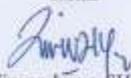
J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Satyalancana Karya Satya	Presiden	2013

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Pengabdian Kuliah Kerja Sibernas (KKS Pengabdian).

Gorontalo, 10 Juni 2019
Ketua


Nirwan Junus, SH., MH
NIP. 19690602 200003 2 001

Lampiran 2b: Biodata Anggota Tim Pelaksana

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ANGGOTA I

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	PROF. DR. FENTY U. PULUHULAWA, SH, M.Hum
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Guru Besar
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	1968 0409 1993 03 2001
5	NIDN	0009046804
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 9 April 1968
7	E-mail	fentypuluhulawa@ung.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	(0435) 834102, Hp. 081340141408
9	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Universtas Negeri Gorontalo Jl. Jend Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo
10	Nomor Telepon/Faks	(0435) 834102
11	Lulusan yang Telah Dihilangkan	S-1 =0 Orang; S-2 =0Orang; S-3 =1Orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1.Hukum Pidana
		2.Hukum Lingkungan
		3.Hukum Pertambangan
		4.Metode Penelitian Hukum
		5. Pengantar Hukum Indonesia

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Univ. Muslim Indonesia Makassar	Univ. Hasanuddin Makassar	Univ. Hasanuddin Makassar
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum

Tahun Lulus	1991	2000	2011
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Tinjauan Kriminologis Kenakalan Remaja di Gorontalo.	Penerapan Pidana Denda Dalam Kasus Pidana.	Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Nama Pembimbing/Promotor	Prof. DR. Rusli Effendy. SH	Prof. DR. Rusli Effendy. SH	Prof. DR. Abdullah Marlang, SH., MH

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jmlh (Juta Rp)
1	2008	Aspek Yuridis Perda Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006	PNBP	3,5 Juta
2	2011	Pengawasan Pada Pertambangan Rakyat di Provinsi Gorontalo	PNBP	3,5 Juta
3	2013	Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Illegal Logging Di Provinsi Gorontalo	PNBP	25 Juta
4	2013	Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Pertambangan Rakyat Di Provinsi Gorontalo	DIKTI Tahun I	50 Juta
5	2014	Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Pertambangan Rakyat Di Provinsi Gorontalo	DIKTI Tahun ke II	48.122.500
6	2015	Kebijakan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan Lokal Pada Suku Bajo di Gorontalo	IDB dan DP2M DIKTI Tahun I	105 Juta
7	2016	Kebijakan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan Lokal Pada Suku Bajo di Gorontalo	IDB dan DP2M DIKTI Tahun II	225 Juta
8	2017	Kebijakan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan Yang	IDB dan DP2M	197.574.000

		Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan Lokal Pada Suku Bajo di Gorontalo	DIKTI Tahun III	
--	--	---	-----------------	--

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun

Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jmlh (juta Rp)
1	2008	Penyuluhan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Dana DIKS	2 Juta
2	2007-sekarang	PLPG	Diknas	4 Juta
3	2011-sekarang	Konsultan Lembaga Bantuan Hukum UNG	-	-
4	2014	Pemanfaatan Alat Penangkap Ikan Tradisional Buili dan Peningkatan Kesadaran Hukum masyarakat Nelayan Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan Di Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai	DP2M-DIKTI	72 .500.000
5	2016	Inovasi Pemanfaatan Limbah Kotoran Ternak Melalui Fermentasi Sebagai Pupuk Dalam Mendukung Kelestarian Lingkungan Serta Implementasi Perda Hewan Lepas Dikabupaten Gorontalo	DP2M-DIKTI	70 .000.000
6	2017	Pemberdayaan Wanita Pesisir Dalam Mengurangi Dampak Pencemaran Lingkungan Melalui Pengembangan Potensi Lokal Limbah Jeroan Ikan	DP2M-DIKTI	75 .000.000

E. Publikasi Artiel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Kewenangan Perizinan Dalam Pengelolaan Lingkungan Pada Usaha Pertambangan,	Jurnal Legalitas	Volume 2, Agustus 2010, ISSN 1979-5955.
2	Substansi Hukum Tentang Pengawasan Izin Pada Usaha Pertambangan.	Jurnal Pelangi	Nomor 4, Volume 3, September 2010, ISSN 1979-5262.
3	Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.	Jurnal Dinamika Hukum	Nomor 2, Volume 11, Mei 2011, ISSN 1410-0797.
4	Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.	Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa	Nomor 2, Volume 19, Juni 2011, ISSN 0853-1609.
5	Potensi Tambang di Gorontalo Berkah Atau Ancaman, Jurnal Gagasan Hukum, Mey 2011, ISSN 1979-9373, http://gagasanhukum.wordpress.com/category/artikel-dosen .	Jurnal Gagasan Hukum	Mey 2011, ISSN 1979-9373.
6	Antara Hak Dan Kewajiban, Jurnal Gagasan Hukum, Juli 2012, ISSN 1979-9373, Juli 2012, http://gagasanhukum.wordpress.com/category/artikel-dosen .	Jurnal Gagasan Hukum	Juli 2012, ISSN 1979-9373
7	Kerusakan Hutan Dan Lemahnya Penegakan Hukum, Jurnal Gagasan Hukum, 1 Agustus 2012, ISSN 1979-9373.	Jurnal Gagasan Hukum,	1 Agustus 2012, ISSN 1979-9373.

8	Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan. Artikel Gagasan Hukum, 03 Februari 2014, ISSN 1979-9373, http://gagasanhukum.wordpress.com/category/artikel-dosen	Jurnal Gagasan Hukum	03 Februari 2014, ISSN 1979-9373
9	Negative Impact Prevention to the Environment on illegal Community Mining toward Command and Control Approach	Jurnal Dinamika Hukum	Vol 15 No.3. September 2015, ISSN 1410-0797
10	Lokal Value in Management of Fish Resource and Development of Law (Studies of Bajo Tribe in Gorontalo), e ISSN 2442-9899 Hasanuddin Law Review Volume 1 Issue 3, December 2015.	Hasanuddin Law Review	3, December 2015, ISSN 2442-9899

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar	Pertambangan Rakyat Di Gorontalo (dilihat dari Perspektif Hukum)	11 Oktober 2013 Hotel Jambura
2	Prosiding Seminar Nasional	Peningkatan Pengetahuan Hukum Nelayan Dalam Memanfaatkan Alat Penangkap Ikan Tradisional Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan	20 November 2014. Universitas Tarumanegara Jakarta.

3	Prosiding Seminar Nasional	Nilai Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan Dan Pengembangan Hukum (Disajikan Pada Seminar Nasional Teknologi, Inovasi dan Humaniora, SENASTEK II	29 Desember 2015 di Hotel Patra Jasa, Kuta Bali. Penyelenggara Universitas Udayana).
4	Prosiding Seminar Nasional	Pemanfaatan Kotoran Ternak Dalam Mendukung Kelestarian Lingkungan Serta Implementasi Perda Hewan Lepas	22 September 2016 Universitas Tarumanegara Jakarta.
5	Penyaji Pada <i>International Congress on Technology Engineering & Science</i>	<i>Protection of Coastal Area: Increase Legal Compliance Based on Local Local Values</i>	28-29 Juli 2016 Kuala Lumpur, Malaysia
6	Penyaji Pada <i>International Congress on Technology Engineering & Science</i>	<i>Legal Protection on Fishery Resources in the Coastal Settlement of the Bajo Tribe Gorontalo</i>	5-6 Agustus 2017 Kuala Lumpur, Malaysia

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Dasar-Dasar Hukum Pidana.	2010	150	UNG Pres

2	Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dalam Perspektif Hukum, Tahun 2013,ISBN 602-14470-0-x.	2013	315	Interpena
3	Problematika Pertambangandan Solusi (Dilihat dari Perspektif Hukum)	2014	72	CV Budi Utama
4	Nilai Lokal dan Hukum Perlindungan Sumber Daya Ikan	2017	128	Alinea Baru Yogyakarta

H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judu/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
	-	-	-	-

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial lainnya yang Telah diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	Penilai Dokumen Amdal	2011	BLH	Baik
2.	Penyusun Draft Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Lingkungan Hidup	2015	BLH	

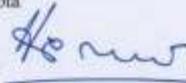
J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Satya Lancana Karya Satya	Presiden	2003

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Pengabdian Kuliah Kerja Sibermas (KKS Pengabdian).

Gorontalo, 10 Juni 2019
Anggota



Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum
NIP: 1968 0409 1993 03 2001

Lampiran 2c: Biodata Anggota Tim Pelaksana

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ANGGOTA II

A. Identitas Anggota

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Karlin Z. Mamu, SH.,MH
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	NUPN	9909913199
4	Tempat dan Tanggal Lahir	Batudaa, 5 Agustus 1984
5	E-mail	karlin.mamu@yahoo.co.id
6	Nomor Telepon/HP	082293417847
7	Alamat Kantor	Jalan Jendral Sudirman No. 6 Gorontalo
8	No. Telepon/Faks	-

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Brawijaya Malang	Universitas Muslim Indonesia, Makassar	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Lulus	2011	2016	
Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi	Dasar dan Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Penolakan Hak Asuh Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 10/ Pdt.G/2009/PA Lbt).	Implementasi Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Pelaku Kejahatan Illegal Logging Di Provinsi Gorontalo	
Nama Pembimbing/ Promotor	Ulfa Azizah, SH., MKn	Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2018	Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Hutan Tanaman Industri Bagi Masyarakat Adat (Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa.)	PNBP	20.000.000

D. Publikasi Artiel Ilmiah Dalam Jurnal Alam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	<i>The Impact of Government Policy on Industrial Forest Plantation Management for Indigenous People in North Gorontalo</i>	<i>Scholars International Journal of Law, Crime and Justice</i>	Vol-1, Iss-3 (Jun-Jul, 2018): 59-63 (URL : http://saudijournals.com/sijlcj-13/)
2	Implementasi Undang-Undang Kehutanan Terhadap Pelaku Kejahatan Illegal Logging	Jurnal Literasi Hukum	Vol 2, No 2 (2018): 1-12 (URL: http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasi_hukum/article/view/1133/0)

E. KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Lokal/ Nasional/ Internasional	Panitia/Peserta /Pembicara
2010	Seminar Internasional dengan tema “ <i>Courage and Precision the Role of the Judge in Modern Society</i> ”.	Seminar Internasional	Peserta

2014	Seminar Nasional “ <i>Optimalisasi Potensi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</i> ” di Provinsi Gorontalo	Nasional	Peserta
2016	Workshop Pancasila, Konstitusi dan ketatanegaraan dengan Tema “ <i>Penataan Sistem Ketatanegaraan, Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN</i> ”.	Nasional	Peserta

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
	-	-	-

G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
	-	-	-	-

H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
	-	-	-	-

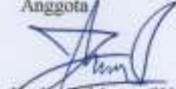
I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial lainnya yang Telah diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
	-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengujian Pengabdian Kuliah Kerja Sibermas (KKS Pengabdian).

Gorontalo, 10 Juni 2019
Anggota


Karlina Z. Mamu, SH, MH
NUPN. 9909913199

Lampiran 2d: Biodata Anggota Tim Pelaksana

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ANGGOTA III

I. DATA PRIBADI:



Nama	Amanda Adelina Harun
Alamat	Jl. Pangeran Hidayat 1, No. 27 Kota Gorontalo, Gorontalo
Tempat Tanggal Lahir	29 Desember 1995
Jenis Kelamin	Perempuan
Pendidikan Terakhir	Magister Hukum (M.H)
Kewarganegaraan	Indonesia
E-mail	amandaadelinaharun@gmail.com
No. Telp.	+62 8521379949

II. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. Sekolah Dasar
Tahun : 2001-2004
Nama Institusi : SDN No. 73 Tenggela
2. Sekolah Dasar
Tahun : 2004-2007
Nama Institusi : SDN No. 83 Kota Tengah
3. Sekolah Menengah Pertama
Tahun : 2007-2010
Nama Institusi : SMP Negeri 1 Gorontalo
4. Sekolah Menengah Atas
Tahun : 2010-2012 (Program Akselerasi)
Nama Institusi : SMA Negeri 3 Gorontalo
5. Perguruan Tinggi (Sarjana)
Tahun : 2012-2016
Nama Institusi : Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo
6. Perguruan Tinggi (Magister)
Tahun : 2016-2018
Nama Institusi : Pascasarjana Hukum
Universitas Islam Indonesia
7. Perguruan Tinggi (Doktor)

Tahun : 2018-sekarang
Nama Institusi : Pascasarjana Hukum
Universitas Islam Indonesia

III. KURSUS

1. Gorontalo English Conversation School, July-September 2006
2. Gorontalo English Conversation School, October-December 2006
3. Gorontalo English Conversation School, July-September 2007
4. Gorontalo English Conversation School, October-Desember 2007
5. Gorontalo English Conversation School, January-March 2008
6. Gorontalo English Conversation School, April-June 2008
7. Gorontalo English Conversation School, July-September 2008
8. Gorontalo English Conversation School, October-December 2008
9. Speaking Course program at Center for Language Development of Gorontalo State University, February-March 2013
10. LIPPO Scholarship English Course, 2016.

IV. PENGALAMAN AKADEMIK

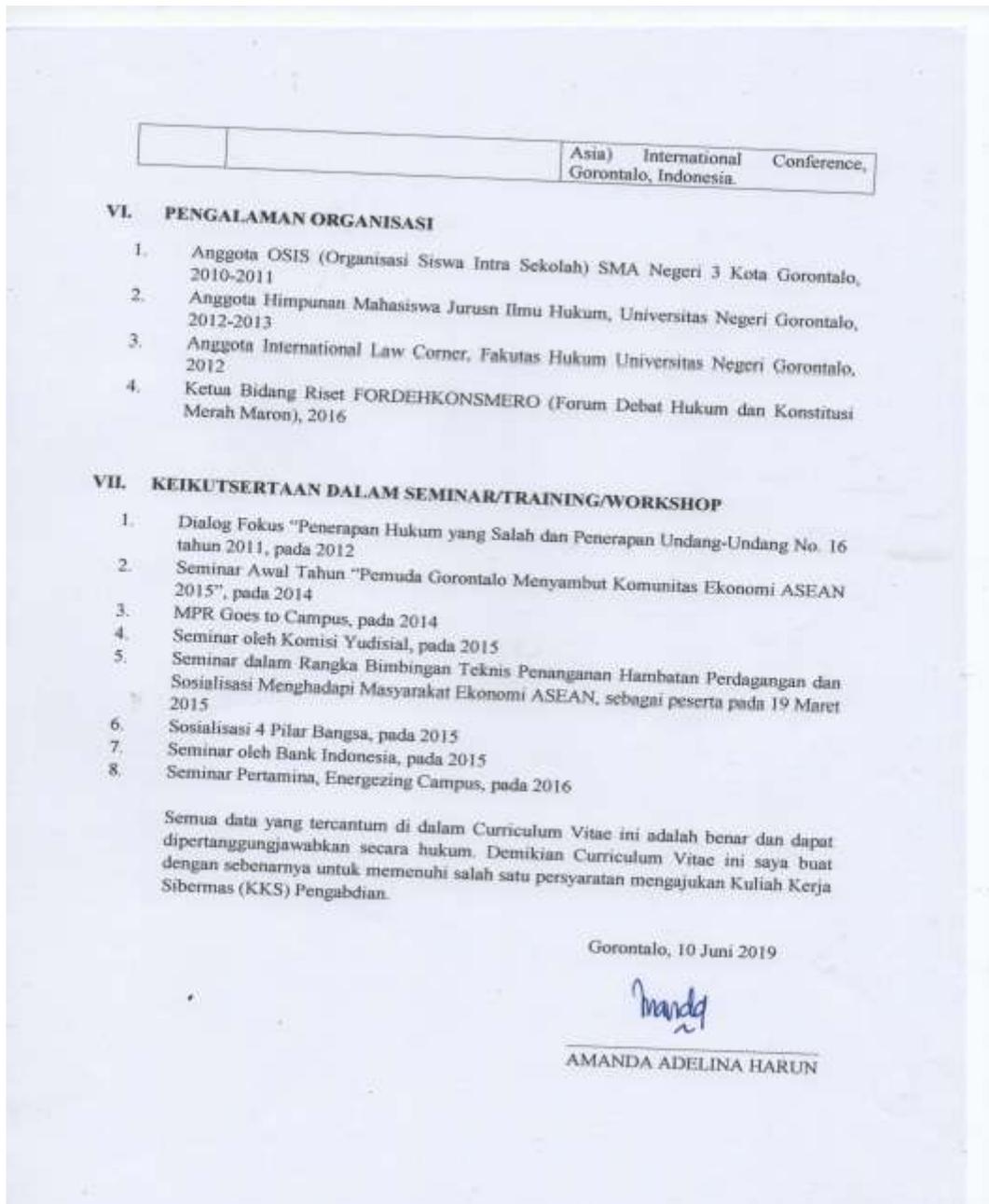
1. Pra OSN (Olimpiade Siswa Nasional) bidang Matematika, Tingkat Kota Gorontalo 2010-2011
2. JOSSEA (Join Opinion Solving South East Asia) International Conference, sebagai pembicara di Universitas Gadjah Mada, pada 2013
3. ILNS (Islamic Law National Summit) Essay Critics Competition, sebagai peserta essai competition di Universitas Indonesia, pada 2013
4. University English Debating Championship 2013, sebagai peserta debat di Universitas Negeri Gorontalo, pada 2013
5. Inter-Asia Cultural Studies International Conference, Oral Presentation, di Univesitas Airlangga, pada 2015
6. Mahasiswa Berprestasi tingkat Universitas Negeri Gorontalo, pada 2016
7. ICONTES (International Congress on Technology – Engineering & Science) Conference, sebagai Co-Author dan Poster presentation di Malaysia, pada 2016
8. ICONTES (International Congress on Technology – Engineering & Science) Conference, sebagai Co-Author dan poster presentation di Malaysia, pada 2017

9. TREPSEA (Transdisciplinary Research on Environmental Problems in Southeast Asia) International Conference, sebagai Co-Author dan oral presentation di Gorontalo, pada 2018.

V. KARYA TULIS

TAHUN	JUDUL	KETERANGAN
2015	“The Shift of Manners Caused ‘Free-mn’, Mafia, and Underground Economy”	Proceeding: Inter-Asia Cultural Studies Conference, Surabaya, Indonesia.
2016	“Protection of Coastal Areas: Increasing of Value Based on Local Compliance”	Proceeding: ICONTES, Kuala Lumpur, Malaysia.
2016	“Urgensi Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 189 Tahun 2011 Tentang Decent Works For Domestical Workers (Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga)”	Skripsi: Fakultas Hukum, Univrsitas Negeri Gorontalo.
2016	“Constitutional Rights of Domestic Workers”	Proceeding: 3 rd World Congress on Human Rights, Jstice and Legal Studies (WCHJL), Baecelona, Spanyol.
2017	“Implementation Article 33 Paragraph (3) of UUD NRI 1945 in Law of Coastal Areas and Small Island Management”	Jurnal: Journal of Law, Policy and Globalization, Vol. 62, 2017. ISSN 2224-3240 (paper) ISSN 2224-3259 (online)
2017	“Legal Protection on Fishery Resources in the Coastal Settlement of the Bajo Tribe Gorontalo”	Proceeding: ICONTES, Kuala Lumpur, Malaysia.
2017	“Indonesian Assets in International Contract from Perspectives of State Immunity”	Visiting Lecturer: Faculty of Collaborative Regional Innovation of Ehime University, Japan.
2018	“Imunitas Aset Negara dalam Pejanjian Antara BUMN dengan Pihak Asing dalam Perspektif Hukum Internasional”	Tesis: Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
2018	“Challenges Implementing Minamata Convention On	Proceeding: TREPSEA (Transdisciplinary Research on

	Mercury In Artisanal Small Scale Gold Mining In Gorontalo”	Environmental Problems in Southeast Asia) International Conference, Gorontalo, Indonesia.
--	--	---



Lampiran 3 :

Dokumentasi Kegiatan Tambahan dilokasi KKS

1) Kegiatan Posyandu



2) Kegiatan Sosial dan Keagamaan





Lampiran 4 : TOR

TERM OF REFERENCE (TOR)

KERANGKA ACUAN

TEMA

**“PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA BUNTULIA
UTARA DALAM MEMBANGUN KESADARAN
MENDAFTARKAN TANAH HAK MILIK”**

Program Sasaran

“Masyarakat yang Belum Mendaftarkan Tanah Hak Milik”

A. Latar Belakang

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil, unit pengambilan keputusan terkecil. Setiap keputusan yang dilakukan di desa akan lebih mengacu pada diri manusia sebagai pribadi, sebelum meluas kepada keluarga, komunitas, pemerintahan desa, kabupaten, provinsi hingga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Membangun desa adalah membangun manusianya. Dari desalah seharusnya kita membangun kemajuan Indonesia. Membangun masyarakat desa harus dimulai dengan menyadarkan setiap individu akan hakikat hidupnya. Keterkaitan masyarakat dengan hukum, perlu adanya suatu proses menyadarkan bahwa dalam kehidupan masyarakat, perilaku individu atau kelompok sosial terikat dengan berbagai norma sosial atau hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berkenaan dengan kesadaran hukum

masyarakat tersebut, masyarakat seyogyanya diberikan pemahaman khususnya dalam hal mendaftarkan tanah.

Tanah pada umumnya berkaitan dengan tempat pemukiman dan kegiatan manusia di atasnya maupun di bawahnya, sedangkan dilihat dari aspek hukum berkaitan dengan hak memiliki dan menggunakan, namun seiring berkembangnya masyarakat, dalam bidang pertanahan sering terjadi konflik pertanahan. Masalah sengketa tanah dimasyarakat ini karena belum meratanya bukti surat kepemilikan tanah yang sah dimiliki oleh masyarakat.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 khususnya Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Dengan adanya pemahaman dan kesadaran masyarakat mendaftarkan tanah, dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum mengenai siapa pemegang hak milik atau hak-hak lain atas sebidang tanah. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah pada tahun 2016 membuat kebijakan tentang percepatan persertipikatan tanah secara masal dan gratis. Kebijakan ini disebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tujuannya yaitu mensertipikatkan seluruh bidang tanah yang belum memiliki sertipikat dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Melalui kegiatan pengabdian ini akan dilakukan sosialisasi tentang pentingnya mendaftarkan tanah hak milik sehingga dapat mempercepat program pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Permenristekdikti Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta UNG

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
6. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat Program KKS Pengabdian Periode 1 UNG tahun 2019 Nomor T/UN.47.DI/PM.01.01/2019 tanggal 10 April 2019

C. Tujuan

1. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat).
2. Terbentuknya kemitraan program **“Pendataan Masyarakat yang Belum Mendaftarkan Tanah Hak Milik”** antara KKS Pengabdian UNG dengan Pemerintah Desa Buntulia Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato
3. Mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanah hak milik.

D. Manfaat Kegiatan

1. Penerapan ilmu secara akademik dalam lapangan kehidupan masyarakat.
2. Wujud pembelajaran dan pelatihan bagi Mahasiswa dalam membangun peran serta diri, lingkungan dan masyarakat serta melatih kemampuan memecahkan persoalan hukum khususnya terkait persoalan hak milik atas tanah .
3. Peluang bagi Mahasiswa peserta KKS Pengabdian untuk melakukan inventarisir masalah maupun potensi yang ada dalam masyarakat, untuk diteruskan menjadi kegiatan pendidikan dan penelitian sesuai dengan bidang ilmu masing-masing.

E. Gambaran Kegiatan

1. Nama Kegiatan : Kuliah Kerja Sibemas Pengabdian Angkatan 1 Tahun 2019
2. Tema Kegiatan : Pendampingan Masyarakat Desa Buntulia Utara Dalam Membangun Kesadaran Mendaftarkan Tanah Hak Milik.
3. **Waktu dan Tempat Kegiatan**
 - a) Waktu : Jum'at 12 April 2018 sampai dengan 24 Mei 2019
 - b) Tempat Kegiatan : Desa Buntulia Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.
4. **Bentuk Kegiatan**

Bentuk kegiatan ini berupa :

 - a) Koordinasi dengan pemerintah Desa dan Kecamatan
 - b) Koordinasi dengan BPN
 - c) Pengumpulan data awal
 - d) Sosialisasi tentang pentingnya mendaftarkan hak milik atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA
 - e) Ikut berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, dalam rangka bulan suci Ramadhan 1440 Hijriah bersama Pemerintah Desa Buntulia Utara.
5. **Target Kegiatan : “Pendataan Masyarakat yang Belum Mendaftarkan Tanah Hak Milik”**

F. Metode Penyajian :

1. Pengumpulan data awal
2. Mengidentifikasi persoalan masyarakat, khususnya terkait dengan persoalan pertanahan
3. Merumuskan masalah dan solusinya (Pertanahan, Pendidikan/Pengetahuan Masyarakat dibidang sosial, agama dan budaya)
4. Pelaksanaan kegiatan:

- Pendataan masyarakat yang belum mendaftarkan tanah hak milik
- Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA
- Kegiatan Sosial keagamaan selama bulan suci Ramadhan

G. Output yang dihasilkan/Luaran :

- Partisipasi masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas (GEMA PATAS), sehingga desa ini menjadi contoh bagi desa lain terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanah hak milik.
- Laporan Akhir
- Jurnal

H. Penutup

Demikian *Term of Reference* ini kami buat sebagai panduan pelaksanaan program dalam membangun kesadaran mendaftarkan tanah hak milik. Program-program lain yang mendukung program kegiatan ini dapat direncanakan dan dilaksanakan sesuai kemampuan peserta KKS Pengabdian dengan bantuan, pendampingan dan petunjuk dari Pemerintah Desa Buntulia Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

Lampiran 5 : SK KKS Pengabdian



• KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo-96128
Telp. (0435) 821125 Fax. (0435) 821752
Laman: www.ung.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : *52C* /UN47/HK.02/2019

Tentang
**PENETAPAN DOSEN PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BIAYA PNB/BLU PERIODE I UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2019**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan Pengabdian adalah salah satu unsur tridharma perguruan tinggi yang harus dijaga dan ditingkatkan mutunya demi penguatan kelembagaan Universitas Negeri Gorontalo;
 - b. bahwa penguatan kelembagaan merupakan salah satu hal penting dalam menjamin peningkatan mutu, maka perlu dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019;
 - c. bahwa dosen yang melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Surat Keputusan ini adalah dosen yang dinyatakan lolos sesuai dengan hasil penilaian proposal oleh reviewer LPPM Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019;
 - d. bahwa berkenaan dengan diktum "a, b, dan c" diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor atas dasar pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- Mengingat :
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peruguran Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI :
 - a. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - b. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan Status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Gorontalo;
 - b. Nomor 18 Taun 2006 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;
 - c. Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 629/M/KPT.KP/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 48 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 131/KMK.05/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019 Nomor SP-DIPA - 042.01.2.400961/2019 tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENETAPAN DOSEN PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BIAYA PNBP/BLU PERIODE I UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2019.

Pertama : Menunjuk Dosen yang nama-nama serta judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini, sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat Program kks Pengabdian kepada Masyarakat Periode I Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019

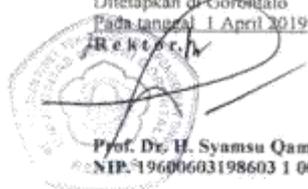
Kedua : Nama-nama dosen yang ditetapkan dengan surat keputusan ini bertugas melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2019 sesuai dengan panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Negeri Gorontalo Edisi I Tahun 2018 dan memasukkan laporan pelaksanaan, laporan kegiatan dan laporan keuangan 100%.

Ketiga : Biaya yang dikeluarkan akibat dari pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat keketiruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya serta diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 1 April 2019

Rektor,



Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd
NIP. 19600603198603 1 003

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo
 Nomor : 506 /UN47/HK.02/2019
 Tanggal : 1 April 2019
 Tentang : Penetapan Dosen Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Program Biaya PNB/BLU Periode I Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019.

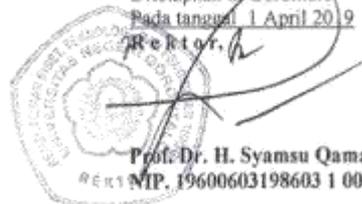
NO	NAMA	JUDUL PENGABDIAN	BIAYA (RP)
1	1. Dr. Asni Ilham, M.Si 2. Gamar Abdullah, S.Si, M.Pd	Parenting Berbasis Kecerdasan Spiritual di Sekolah Dasar	25.000.000
2	1. Hasdiana, S.Pd,M.Sn 2. Dr. Hedy Vanni Alam, S.Pd., M.Si 3. Drs. Suleman Dangkua, M.Hum	Pelatihan Pembuatan Lampu Hias dengan Memanfaatkan Limbah Tongkol Jagung Bagi Masyarakat Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara	25.000.000
3	1. Isnawati Mohamad, S.Pd, M.Pd 2. Dr. Sukma Nurilawati Botutihe, M.Psi, Psikolog	Diversifikasi Keahlian Untuk Meningkatkan Kemandirian Perempuan Tuna Karya Di Desa Motilango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara	25.000.000
4	1. Dr. Jusna Ahmad, M.Si 2. Dr. Chairunnisah J. Lamangantjo, M.Si	Pemberdayaan Masyarakat Desa Datahu Kecamatan Anggrek dalam Memanfaatkan Gulma Siam Menjadi Penyedia Jasa Ekologi dan Ekonomi Lingkungan yang Digunakan Sebagai Pupuk Hijau dan Bokashi	25.000.000
5	1. Prof. Dr. Mohamad Karmin Baruadi, M.Hum 2. Nurdin Mohamad, S.Pd, M.Si	Pemberdayaan Masyarakat Desa Langge Dalam Pengembangan Budaya dan Wisata Mangrove Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara	25.000.000
6	1. Dr. Novianty Djafri, S.Pd.I., M.Pd.I 2. Arfan Utiahman, S.T, M.T 3. Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd	MANAJEMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR LAUT DESA POPALO KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA	25.000.000
7	1. Sitti Suhada, S.Kom, MT 2. Lanto Ningrayati Amali, S.Kom., M.Kom., Ph.D 3. Drs. Muh Rifai Katili, M.Kom	Sistem Informasi Administrasi Desa pada Kantor Desa Tutuwoto Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara	25.000.000
8	1. Dr. Sunarty Suly Eraku, S.Pd., M.Pd. 2. Citra Panigoro, ST, M.Si	Konservasi Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat di Desa Helumo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara	25.000.000
9	1. Ulin Naini, S.Pd,M.Sn 2. Hasmah, S.Pd,M.Sn 3. Isnawati Mohamad, S.Pd, M.Pd	Pemberdayaan Masyarakat Desa Popalo dalam memanfaatkan Limbah Daun Mangga menjadi Produk Kerajinan Tangan	25.000.000
10	1. Dr. Asna Ntelu, M.Hum 2. Dr. Dakia N. Djou, M.Hum	PEMERTAHANAN BAHASA ATINGGOLA MELALUI DIKLAT BAGI MASYARAKAT DI DESA TOMBULILATO KECAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN GORONTALO UTARA	25.000.000
11	Dr. Hartono Hadjarati, S.Pd, M.Pd	Kampung Wisata Raga (Wiraga)-Pelestarian Beladiri Tradisional Langga Di Desa Ilomata Kecamatan Atinggola	25.000.000

NO	NAMA	JUDUL PENGABDIAN	BIAYA (RP)
12	1. Mulis, S.Pi., M.Sc 2. Arafik Lamadi, S.ST, M.P	PENINGKATAN GIZI DAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN TELUR BULU BABI (LANDAK LAUT) UNTUK PANGANAN BAKSO DI DESA KOTAJIN UTARA, KECAMATAN ATINGGOLA, KABUPATEN GORONTALO UTARA	25.000.000
13	1. Dr. Ellyana Hinta, M.Hum 2. Dr. Sitti Rachmi Masie, S.Pd., M.Pd	PEMERTAHANAN BUDAYA DAERAH MELALUI PEMANFAATAN KULINER KHAS SEBAGAI SUMBER PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SIPATANA -- KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO	25.000.000
14	Mutia Cherawaty Thalib, SH, M.H	Peningkatan Pemahaman Hukum Keluarga Bagi Masyarakat Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Dalam Konteks Perubahan Sosial dan Ketahanan Keluarga	25.000.000
15	1. Nirwan Junus, SH,MH 2. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum 3. Karlin Z. Mamu, SH, MH	PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA BUNTULIA UTARA DALAM MEMBANGUN KESADARAN MENDAFTARKAN TANAH HAK MILIK	25.000.000
16	1. Prof. Dr. Sayama Malabar, M.Pd 2. Jafar Lantowa, S.Pd., M.A	PEMBERDAYAAN KELOMPOK KARANG TARUNA MELALUI PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMUDA SADAR BERBAHASA GORONTALO SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KOSAKATA BERBASIS PROGRAM TRUE BASIC DI DESA TALUDUYUNU KEC.BUNTULIA KAB. POHUWATO	25.000.000
17	1. Arip Mulyanto, S.Kom, M.Kom 2. Dian Novian, S.Kom, MT 3. Moh. Hidayat Koniyo, ST, M.Kom	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Budaya Gorontalo Menggunakan Aplikasi Repositori Budaya Gorontalo di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato	25.000.000
18	1. Dr. Lilan Dama, S.Pd, M.Pd 2. Nurrijal, S.Pd., M.Pd	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Implementasi Lesson Study Untuk Melatih Perempuan dan Remamuda Desa Buliti Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato Dengan Metode Learning Community	25.000.000
19	1. Arfiani Rizki Paramata, S.Pi., M.Si 2. Munirah Tuli, S.Pi, M.Si	Inovasi Olahan Hasil Perikanan Ekonomis Penting di Pantai Gentuma Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara	25.000.000
20	1. Dr. Muhammad Mukhtar, S.Pi. M.Agr 2. Siswatiana Rahim Taha, S.Pi,M.Si	Pemanfaatan Tepung Cangkang Telur Ayam Ras Sebagai Pupuk Hijauan Tanaman Pakan Ternak	25.000.000
21	1. Dr. Mohamad Yusuf Tuloli, S.T, M.T 2. Manda Rohandi, S.Kom,M.Kom 3. Rochmad Mohammad Thohir Yassin, ST, M.Eng	Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Konten Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata Bawah Laut	25.000.000
22	1. Nikmasari Pakaya, S.Kom., MT 2. Jemmy Pakaja, M.Kom	SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA APARAT DESA PADA DESA ZURIATI	25.000.000

NO	NAMA	JUDUL PENGABDIAN	BIAYA (RP)
23	1. Wawan Pembengo, SP, M.Si 2. Suyono Dude, S.Ag,M.Pd,I	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM CoC (CITY OF CLIMATE) GUNA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	25.000.000
24	1. Dr. Laksmyn Kadir, M.Kes 2. Wimangsi Din Uno, S.Pd,M.Kes	Pemberdayaan Masyarakat tentang Manfaat "SUJAKAJU" sebagai Solusi Stunting	25.000.000
25	1. Drs. Asri Arbie, M.Si 2. Abd. Wahidin Nuayi, S.Pd, M.Si	Peningkatan Kapasitas Guru IPA/Fisika SMP dan SMA Melalui Implementasi Pembuatan Instrumen Penilaian Afektif dan Keterampilan Proses Sains Berbasis Pendidikan Karakter Se-Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara	25.000.000
26	1. Dr. Trisnawaty Junus Buhungo, S.Pd, M.Pd 2. Abd. Wahidin Nuayi, S.Pd, M.Si 3. Supartin, S.Pd,M.Pd	Peningkatan Kapasitas Guru IPA SD melalui Implementasi Perangkat Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran Sains Terintegrasi Kecakapan Hidup Di Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara	25.000.000
27	1. Wawan K. Tolinggi, S.P., M.Si 2. Lillyan Hadjaratie, S.Kom, M.Si 3. Rahman Takdir, S.Kom, M.Cs	Penguatan Masyarakat Sentra Agroforestry Desa Cempaka (SENFORMPA) Sebagai Model Agro Techno Park di Kabupaten Gorontalo Utara	25.000.000
28	1. Dr. Fory Armin Naway, M.Pd 2. Arifin, S.Pd, M.Pd	Pelatihan Pengelolaan Media Pembelajaran Berbasis E-Learning Di Sekolah Di Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo	25.000.000

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 1 April 2019

Rector,



Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd
NIP. 19600603198603 1 003